



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Identifikasi Kesenjangan Layanan Dasar Rumah Tangga dan Infrastruktur: Studi Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Penurunan Kemiskinan di Kota Palembang

Harrey Hadi^{1*}, Alfitri², Abdul Nadjib³, Ardi Adji⁴

¹Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, harreyh1965@gmail.com

²Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, alfitri@unsri.ac.id

³Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, abdulnadjib@fisip.unsri.ac.id

⁴Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, Indonesia, win.djeroh@gmail.com

*Corresponding Author: harreyh1965@gmail.com

Abstract: *The issue of poverty in Palembang City has not been fully resolved. Therefore, targeted poverty alleviation policies and programs are needed so that the use of government budgets can be more effective. This study aims to identify gaps in basic household services and infrastructure in supporting poverty reduction efforts in Palembang City. This research was conducted in July 2025 using a descriptive qualitative approach through interviews and field observations. The respondent sampling method in this study used purposive sampling. The respondents were poor households in Palembang City. The data obtained were analyzed descriptively in a systematic and factual manner. The results of this study showed that uninhabitable housing conditions, lack of access to clean water and sanitation, and low security indicate that the budget has not fully met the basic needs of vulnerable groups. Poor households still live in flood-prone areas, use rivers for toilet facilities, and suffer from environment-related diseases. This shows the importance of increasing budget allocations for basic housing and settlement infrastructure that are more targeted and on target.*

Keywords: *Disparity, Basic Infrastructure, Poverty Reduction, Palembang*

Abstrak: Persoalan kemiskinan di Kota Palembang, belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran agar penggunaan anggaran pemerintah dapat lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dasar rumah tangga dan infrastruktur dalam mendukung upaya penurunan kemiskinan di Kota Palembang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif melalui wawancara dan observasi lapangan. Metode pengambilan sampel responden pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Responden yang digunakan adalah rumah tangga miskin di Kota Palembang. Data yang dihasilkan dianalisis secara deskriptif secara sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi rumah tidak layak, minimnya akses air bersih dan sanitasi, serta rendahnya keamanan menunjukkan bahwa anggaran belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan dasar kelompok rentan. Rumah tangga miskin masih tinggal di daerah

banjir, menggunakan sungai untuk MCK, dan menderita penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Kesenjangan, Infrastruktur Dasar, Penurunan Kemiskinan, Palembang

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang (Nasution, 2014). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mayoritas negara telah menyepakati sebuah dokumen global yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang di dalamnya memuat tujuan memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan di seluruh tempat. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan komitmen nyata dari pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan pengentasan kemiskinan (Salam et al., 2022; Wahyuni et al., 2023). Pembangunan infrastruktur dasar dapat menurunkan kemiskinan.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai seperangkat struktur teknis dan fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kegiatan produktif, baik dalam bidang jasa, kebijakan, maupun aktivitas sosial dan personal (Oktaviana et al., 2024). Peran infrastruktur dalam pengentasan kemiskinan di Brasil menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan infrastruktur berkontribusi pada pencapaian Millennium Development Goals (MDGs). Kontribusi tersebut tercermin melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat miskin, yang diwujudkan antara lain dalam bentuk peningkatan akses ke pasar lokal maupun regional, serta optimalisasi cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, teknologi informasi, dan sanitasi dasar. Penyediaan infrastruktur dengan demikian merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, infrastruktur berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus membantu mengurangi kemiskinan yang berkepanjangan (Marinho et al., 2017).

Berdasarkan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018, terjadi kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10.96% dan mengalami peningkatan menjadi 11.13% di tahun 2015. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan turun menjadi 10.7% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2018, laju penurunan tingkat kemiskinan tersebut masih bersifat fluktuatif dan belum konsisten. Salah satu caranya dilakukan dengan pembangunan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Indonesia (Tinambunan et al., 2020). Kemiskinan rumah tangga merupakan salah satu tantangan sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum. Kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan kesempatan kerja (Lazuardi et al., 2025).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2013–2023 menunjukkan tren penurunan, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode yang sama mengalami fluktuasi. Permasalahan utama kemiskinan di wilayah perkotaan berkaitan dengan akses terhadap perumahan, air minum, dan sanitasi, khususnya terkait dengan keterjangkauan hunian yang layak. Pada tahun 2023, hanya 61,82% rumah tangga di Kota Palembang yang menempati hunian layak, sedangkan 34,50% rumah tangga masih bergantung pada sumber air minum dari air kemasan. Ketergantungan pada air kemasan menjadi beban tambahan bagi rumah tangga miskin dan rentan karena mengurangi alokasi pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk konsumsi produktif. Dari aspek sanitasi, sebesar 95,16% rumah tangga di Kota Palembang

telah memiliki akses terhadap sanitasi layak, dengan rincian 94% menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri dan 5,3% menggunakan fasilitas bersama. Kondisi ini sejalan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 6, yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Sementara itu, dari sisi kepemilikan tempat tinggal, 68,1% rumah tangga di Kota Palembang menempati rumah milik sendiri, 9,40% menyewa rumah, dan 22,50% lainnya menempati tempat tinggal dengan status kepemilikan berbeda.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan kemiskinan di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran agar penggunaan anggaran pemerintah dapat lebih efektif. Studi-studi sebelumnya juga menegaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut harus diiringi dengan pendekatan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu secara langsung menjangkau kelompok miskin (Edison & Andriansyah, 2023). Namun demikian, identifikasi kesenjangan layanan dasar rumah tangga dan infrastruktur sebagai strategi penurunan kemiskinan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dasar rumah tangga dan infrastruktur dalam mendukung upaya penurunan kemiskinan di Kota Palembang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 yang dilakukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif secara deskriptif melalui proses *interview* secara mendalam dengan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar lokasi penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara lengkap dan jelas. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi (Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara secara mendalam dan observasi lapangan. Metode pengambilan sampel responden pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin di Kota Palembang. Sampel ditetapkan sesuai dengan relevansi informasi dengan tujuan penelitian, yaitu Sembilan rumah tangga miskin yang dipilih berdasarkan kriteria: (1) tingkat kemiskinan/kerentanan tinggi; (2) berdomisili pada lokasi permukiman kumuh, kantong kemiskinan, atau bantaran sungai; dan (3) mengalami langsung keterbatasan layanan dasar.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari kegiatan yang dilakukan, yaitu: (1) wawancara mendalam dengan masyarakat miskin yang tinggal di daerah permukiman perumahan kumuh, kantong kemiskinan, dan bantaran sungai; (2) observasi dengan mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan masyarakat miskin sehari-hari; dan (3) dokumentasi dengan mengumpulkan data dari dokumen pemerintah seperti laporan anggaran pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman. Sedangkan data sekunder dihasilkan dari studi literatur tentang pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, dan penganggaran di Kota Palembang. Tinjauan ini mencakup artikel ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan realisasi anggaran pemerintah. Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dasar rumah tangga dan infrastruktur secara sistematis dan faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Fisik Rapuh dan Sempit

Layanan dasar rumah tangga adalah kecukupan luas tempat tinggal minimal per kapita (*sufficient living space*) dan ketahanan bangunan (*durable housing*). Untuk indikator kecukupan luas tempat tinggal, BPS mengacu pada *sufficient living space* yakni 7,2 m² per kapita indikator ketahanan bangunan. Ketahanan bangunan dilihat dari jenis atap yang digunakan, bahan dinding rumah serta jenis lantai rumah. Suatu rumah dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila atap rumah terbuat dari genteng, kayu/sirap, dan seng. Sedangkan dinding harus terbuat dari tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu. Lantai rumah layak huni terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, atau semen/ bata merah. salah satu indikator saja yang tidak terpenuhi, maka layanan rumah tangga tersebut akan dikategorikan sebagai layanan rumah tangga yang layak (Wijayanto, 2021).

Sebagian besar informan tinggal di rumah berkontruksi sederhana dari papan, bambu, atau beton seadanya. Rumah berada di bantaran sungai, rumah rakit, atau unit rusun yang sudah tua. Sebagian rumah mengalami kerusakan berat hingga pernah roboh. Responden menjelaskan bahwa rumah pribadinya roboh karena penyangga bambu rapuh, sehingga ia menumpang di rumah adik. Rumah berukuran 18 m² ini tidak memiliki sekat ruangan; ruang keluarga digunakan sekaligus sebagai ruang tamu dan tempat tidur. Kondisi serupa dialami oleh beberapa informan lain: rumah berukuran 24 m² atau 16 m² tanpa kamar tidur, dinding belum diplester, atap bocor, dan lantai kayu mulai rapuh. Adapun responden yang hidup sendirian dalam rumah 4 × 4 meter mengakui rumahnya rapuh dan sering bocor, tetapi ia “dinyaman-nyamankan saja” karena tidak ada pilihan lain.

Kondisi rapuh dan sempit juga dialami oleh responden lain. Responden tinggal bersama istri dan anaknya yang bisu di rumah rakit berukuran 4 × 6 meter yang dibangun di atas bambu sejak 1980; lantai rumah bolong dan rapuh, atap baru sebagian diganti karena bocor dan dinding memerlukan perbaikan. Bagian rumah digunakan untuk mengecat perahu sehingga ruang tidur hanya satu ruangan. Responden dan keluarganya menempati rumah 4 × 6 meter berdinding papan dan seng tanpa kamar tidur khusus; atap dan dinding rapuh dan sering bocor. Rumah ini berdiri hanya sekitar tiga meter dari tepi sungai dan sebagian lahannya sudah dibebaskan pemerintah, sehingga mereka terancam digusur. Responden menempati rumah berukuran 6 m² yang dibangun anaknya; meski tiga tahun lalu diperbaiki menggunakan beton, atap masih bocor dan dinding berlubang sehingga rumah terasa tidak nyaman. Responden tinggal di rumah 4 × 6 meter yang dibangun anaknya di atas lahan fasilitas umum; ia mengaku rumahnya cukup nyaman karena tidak bocor, tetapi bangunan tidak bersertifikat dan dapat dibongkar kapan saja oleh pemerintah.

Di kondisi lain seperti rusun, bangunan tampak lebih permanen namun mulai menunjukkan usia. Responden menempati unit rusun lantai 4 seluas 36 m² yang ia dapat secara cuma-cuma dari saudara. Dinding rumah kusam, penuh coretan, dan WC belum pernah diperbaiki; saluran air mandi dan mencuci langsung dialirkan ke lubang toilet yang sama. Responden, penghuni rusun lainnya, menilai rumahnya “nyaman karena tidak ada pilihan lain”; namun ia mengeluhkan banyak kecoa, tikus dan tangga yang rapuh di tower tua.

Ketiadaan Ruang Privasi dan Fasilitas Pendukung

Ketiadaan ruang privasi, merujuk pada kondisi rumah yang tidak menyediakan pemisahan ruang yang memadai untuk aktivitas pribadi, seperti tidur, belajar, atau interaksi antaranggota keluarga. Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologis, konflik sosial dalam keluarga, serta menurunkan kualitas hidup. Ketiadaan fasilitas pendukung menunjukkan tidak tersedianya fasilitas dasar rumah tangga, seperti sanitasi (toilet, kamar mandi), air bersih, dapur yang layak, ventilasi, maupun listrik. Ketiadaan fasilitas ini

menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan dapat berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental.

Keterbatasan ruang menyebabkan tidak adanya privasi. Dari beberapa responden rumah tidak memiliki kamar terpisah, semua aktivitas dilakukan di satu ruangan. WC pribadi pun sering berada di luar bangunan. Salah satu responden harus menempuh WC di samping rumah sehingga menyulitkan saat pada malam hari. Keterbatasan ruang juga menyebabkan dapur sangat kecil atau menyatu dengan ruangan tidur, sehingga aktivitas memasak, makan, belajar dan tidur bercampur. Beberapa responden lain menempati rumah liar di atas tanah fasilitas umum yang sewaktu-waktu bisa digusur jika lahan akan digunakan pemerintah.

Ketiadaan ruang privasi dan fasilitas pendukung terlihat jelas pada responden lain. Terdapat responden dengan rumah rakit hanya memiliki satu ruang tidur sehingga sebagian ruangan difungsikan sebagai tempat bekerja mengecat kapal. Responden tersebut tidak memiliki WC yang layak, sanitasi berupa lobang cemplung langsung ke sungai dan keluarga menyalurkan limbah melalui ruang kecil di dalam rumah. Responden lain ada juga yang tidak memiliki WC di rumah, keluarganya menumpang WC tetangga dan menampung air pasang ke dalam drum untuk mandi karena tidak ada jaringan air bersih. Di wilayah tempat tinggalnya bahkan belum ada MCK umum sehingga seluruh warga terpaksa menggunakan sungai untuk melakukan aktivitas seperti mandi, cuci dan kakus. Hal serupa dialami oleh salah satu responden, sekitar 70% warga di lingkungannya memanfaatkan anak sungai musi sebagai MCK. Ketiadaan kamar tidur dan fasilitas sanitasi menegaskan betapa minimnya standar hunian layak bagi kelompok miskin yang juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pemukiman sungai.

Akses Air Bersih dan Sanitasi

Indikator akses terhadap air minum dilihat dari sumber air yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan minumannya. Suatu rumah tangga dikatakan mendapatkan akses air minum yang layak apabila sumber air minumannya berasal dari leding meteran, leding eceran, keran umum, hidran umum, penampungan air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minumannya, dikategorikan memiliki akses air minum yang layak apabila sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.

Indikator akses terhadap sanitasi yang layak dilihat dari tiga aspek yakni keberadaan fasilitas tempat buang air besar beserta orang yang menggunakannya, jenis kloset yang digunakan dan tempat pembuangan akhir tinja. Suatu rumah tangga dikatakan mempunyai fasilitas buang air besar yang layak bila mempunyai fasilitas buang air besar, dan fasilitas tersebut digunakan hanya oleh anggota rumah tangga tersebut dan/atau digunakan bersama anggota rumah tangga lain tertentu. Jenis kloset yang digunakan harus berjenis leher angsa, dengan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL. Indikator akses terhadap sanitasi yang layak dilihat dari tiga aspek yakni keberadaan fasilitas tempat buang air besar beserta orang yang menggunakannya, jenis kloset yang digunakan dan tempat pembuangan akhir tinja. Jika tidak memenuhi indikator akses sanitasi tersebut maka tidak layak (Wijayanto, 2021).

Sanitasi merupakan persoalan serius. Responden tidak memiliki toilet pribadi; ia menggunakan WC cemplung umum di pinggir sungai. Buang air kecil dilakukan di ruang kecil dalam rumah, dan limbah mengalir langsung ke bawah rumah. Responden tidak memiliki WC; ia dan tetangganya memakai sungai untuk buang air besar. Di rusun, toilet ada tetapi tidak layak; responden menyampaikan bahwa seluruh saluran air mandi dan cuci dialirkan ke lubang WC yang sama sehingga MCK rusak. Selain itu, WC berada di luar rumah sehingga tidak aman bagi perempuan dan lansia.

Narasi dari responden lain memperkuat gambaran sanitasi yang buruk. Adanya menggunakan lubang cemplung yang langsung mengalirkan kotoran ke Sungai Musi. Salah satu responden ada yang tidak memiliki WC sama sekali; ia dan keluarganya menumpang WC tetangga dan jika banjir mereka terpaksa menggunakan sungai untuk MCK karena belum ada fasilitas umum. Responen menggunakan WC umum karena rumahnya tidak dilengkapi kamar mandi. Responden penghuni rusun, mengeluhkan banyak kecoa dan tikus di kamar mandi dan tangga rusun; bangunan tahun 1981 itu kumuh, tangganya rapuh dan berisiko roboh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa unit rusun memiliki toilet, fasilitas tersebut kotor, rusak atau tidak dirawat sehingga tetap tidak layak digunakan.

Kesehatan dan Kenyamanan

Ketidaktersediaan air bersih dan sanitasi menyebabkan masalah kesehatan dan kenyamanan. Maka dari itu adanya akses terhadap sanitasi yang layak yang berpengaruh pada kondisi kesehatan dan berimplikasi pada peningkatan kualitas manusia (Andrianus & Alfatih, 2023). Adanya responden yang mengalami batuk, gatal-gatal, penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan ringan akibat tinggal di rumah lembab dan menggunakan air sungai. Keluarga responden lainnya juga mengalami seperti sering batuk, pilek dan gatal saat banjir. Selain itu, rumah di bantaran sungai sering dihampiri ular, biawak dan monyet sehingga meningkatkan risiko penyakit dan kecelakaan.

Lingkungan disekitar bantaran sungai memiliki masalah terkait kondisi sekitar sungai. Sebagian besar responden tinggal di bantaran sungai yang rawan pasang dan banjir. Salah satu responden mengungkapkan bahwa rumahnya pernah terdampak pasang air sungai; binatang liar seperti ular piton, biawak dan monyet sering masuk ke lingkungan rumah. Informan lain juga menyebut keberadaan nyamuk, kecoa dan tikus yang mengganggu kenyamanan. Kondisi lain seperti di Rusun terjadi pengelolaan sampah yang buruk, penghuni lantai atas membuang sampah ke bawah sehingga menumpuk di atap unit di bawahnya. Kondisi lingkungan yang kumuh ini meningkatkan risiko penyakit menular.

Lingkungan dan Keamanan

Perkembangan permukiman kumuh menurut Ritohardoyo & Sadali, (2017) adalah aspek lingkungan terkait dengan kondisi air bersih, drainase, sanitasi, sampah, aksesibilitas, rumah sehat, dan rumah layak huni. Salah satu fakta yang terjadi di perkotaan, dapat ditunjukkan akibat meningkatnya penduduk perkotaan, adalah tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman yang tidak teratur, liar, dan tidak layak huni. Kondisi inilah yang menjadi awal perkembangan kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Adanya hal tersebut menimbulkan konflik sosial dan keamanan yang tidak terjaga.

Responden mengeluhkan keamanan yang rendah di lingkungan mereka sehingga menimbulkan konflik sosial. Salah satu responden menyebut pernah terjadi pencurian telepon genggam dan rumah mereka menjadi sasaran lemparan batu ketika terjadi tawuran antar kelompok dari luar kampung. Ia menilai ketiadaan penerangan jalan umum memperbesar risiko konflik dan kejahatan. Adapun responden lain mengeluhkan tidak adanya ronda malam dan lampu jalan; ia pernah mendengar kasus pembegalan dan pencurian di sekitar tempat tinggalnya. Kondisi ini memperkuat pentingnya penerangan, pos keamanan dan partisipasi warga untuk menjaga ketertiban.

Ketergantungan pada Bantuan Sosial

Program bantuan sosial merupakan salah satu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan memastikan mereka dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan gizi. Selain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program-program ini

bertujuan memberikan bantuan langsung kepada kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang terpinggirkan di daerah perkotaan dan pedesaan. Program-program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak (Hakim et al., 2024).

Selain pendapatan utama, hampir semua responden menerima bantuan sosial: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bedah rumah, subsidi sambungan air PDAM atau raskin. beberapa responden mengaku menerima PKH dan BPNT; salah satu responden pernah menerima PKH Rp 225 ribu per bulan dan raskin tetapi sekarang tidak lagi. Responden lain juga mendapat bantuan beras setiap tiga bulan. Bantuan ini membantu sementara tetapi belum mengubah kondisi perumahan atau ekonomi secara signifikan.

Prioritas dan Harapan Infrastruktur

1. Perbaikan rumah dan bedah rumah

Program bedah rumah merupakan salah satu solusi agar supaya masyarakat yang kurang mampu, bisa mendapatkan kesejahteraan, dimana masyarakat yang kurang mampu bisa memperoleh hidup yang layak dan nyaman (Hasanah et al., 2025). Program bedah rumah ini terjadi dikarenakan pemerintah pemerataan pembangunan. Suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan infrastruktur dalam penanganan pemukiman. Program bedah rumah merupakan wujud program yang berorientasi masyarakat miskin yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni (Saputra, 2022). Ini merupakan salah satu aspek penting yang melekat pada pemerintah, pemerintah dalam tugasnya harus mampu mengeluarkan produk kebijakan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga implementasi sederhana yang bersentuhan dengan masyarakat dapat dapat bermanfaat. Ketika diminta menyusun prioritas, hampir semua informan menempatkan perbaikan atau pembangunan rumah tinggal (bedah rumah) di urutan pertama. Salah satu responden menekankan bahwa bedah rumah menjadi prioritas karena rumahnya rapuh, bocor dan sempit. Responden lain juga memberikan suara; meski pasrah, setuju bahwa perbaikan rumah penting agar hunian lebih layak. Informan lain berharap adanya rehabilitasi rumah atau program rusunawa yang dekat dengan lokasi mereka agar tidak terpisah dari mata pencaharian.

2. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Ketersediaan air yang memadai sangat terkait dengan kemiskinan. Ketersediaan air yang memadai akan meningkatkan produktivitas, baik pada sektor lingkungan dan kesehatan. Adanya peningkatan pelayanan dasar infrastruktur air minum bersih serta sanitasi menjadi identifikasi evaluasi kebijakan sebagai penilaian program berjalan sesuai tujuan dan sarannya (Chehafudin et al., 2022). Infrastruktur air adalah segala sarana dan prasarana yang berguna untuk menopang penyediaan air dalam suatu wilayah, yang meliputi penyediaan air bersih, sistem sanitasi, dan drainase. Berkenaan dengan penyediaan air bersih, pengelola penyediaan air bersih yang utama di Indonesia adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Rediansyah et al., 2023). Kemudahan akses air minum layak dan sanitasi layak merupakan tujuan dari (SDGs) menjadi sasaran pembangunan perumahan dan pemukiman kota (Utami & Ubaidillah, 2022). Beberapa responden menempatkan air bersih sebagai prioritas kedua karena rumah tangganya belum tersambung PDAM. Salah satu responden menginginkan air bersih untuk minum, mandi, mencuci dan MCK, serta usul pembangunan WC umum. Adapun responden lain berharap adanya subsidi sambungan air dan perbaikan toilet rusun.

3. Perbaikan Jalan, Drainase dan Penerangan

Jalan adalah infrastruktur di bidang transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, berdasarkan kewenangan/status jalan, jalan umum dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Berdasarkan kondisinya, jalan dapat dibedakan menjadi jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat sebagai parameter perbaikan. Sistem drainase adalah rangkaian kegiatan yang membentuk upaya pengaliran air, baik air permukaan (*limpasan/run off*), maupun air tanah (*underground water*) dari suatu daerah atau kawasan. Sistem drainase merupakan bagian penting pada suatu kawasan perumahan. Suatu kawasan perumahan yang tertata dengan baik haruslah juga diikuti dengan penataan sistem drainase yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi terutama yang menyangkut aspek kesehatan lingkungan permukiman (Fairizi, 2015). Infrastruktur listrik merupakan bagian dari penerangan yang segala sesuatu menyangkut dengan pembangkit tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, gardu induk, atau instrumen kelistrikan lainnya yang berguna mendukung pembangunan ekonomi (Rediansyah et al., 2023). Beberapa responden menempatkan perbaikan jalan dan akses transportasi sebagai prioritas utama. Salah satu responden menjelaskan bahwa jalan setapak yang rusak menyebabkan kecelakaan dan merusak dagangannya. Karena itu, ia menempatkan perbaikan jalan lingkungan di urutan pertama, diikuti air bersih, bedah rumah dan penerangan jalan. Responden lain berharap adanya penerangan jalan umum untuk mencegah tawuran.

4. Pelaksanaan Program yang Transparan dan Berkelanjutan

Pelaksanaan program yang transparan dan berkelanjutan merupakan landasan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga mengutamakan aspek sosial yang inklusif dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan, karena pembangunan yang sukses adalah yang mampu menciptakan keseimbangan tanpa merusak sumber daya alam yang ada dan memberikan manfaat jangka panjang lingkungan wilayah tersebut. Pembangunan berkelanjutan dan transparan melibatkan masyarakat, kesuksesan pembangunan berkelanjutan juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan mereka dan lebih proaktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Agar tujuan pembangunan berkelanjutan ini dapat tercapai, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus merancang kebijakan yang tepat dan memadai sesuai dengan anggaran yang ada (Sinamo et al., 2025). Sebagian besar responden menginginkan program anggaran dilaksanakan secara rutin, transparan dan melibatkan warga. Salah satu responden berharap program pengalokasian anggaran dilakukan berkelanjutan; menyoroti perlunya transparansi besaran anggaran dan peruntukannya, serta keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Responden lain menekankan bahwa program harus rutin, warga mendapatkan informasi jelas, dan ada partisipasi. Mereka juga mengusulkan agar bantuan diberikan dalam bentuk fisik (bedah rumah, pemasangan PDAM) bukan uang tunai agar tepat guna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi rumah tidak layak, minimnya akses air bersih dan sanitasi, serta rendahnya keamanan menunjukkan bahwa anggaran belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan dasar kelompok rentan. Rumah tangga miskin masih tinggal di daerah banjir, menggunakan sungai untuk MCK, dan menderita penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang lebih terarah dan tepat sasaran.

REFERENSI

- Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 54–60. <https://doi.org/10.37034/infv5i1.206>
- BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Sumatera Selatan. In *Badan Pusat Statistik*.
- Chehafudin, M., Wibawa, S., & Wibowo, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum serta Sanitasi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(1), 374–387. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i1.94>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches(4th ed.). In *Sage Publications*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237>
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–146. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>
- Fairizi, D. (2015). file:///F:/Jurnal Drainase/Pemodelan Bahaya Banjir Kawasan Perkotaan Kota Kendari.pdf. *Sipil, Jurusan Teknik Sriwijaya, Universitas Besar, Bukit Sumatera, Palembang*, 3(No. 1).
- Hakim, A., Badjo, A., Wibowo, A. H. M., Afin, A. S., Ricnaldi, R., Putra, R. R., & Afriyadi, A. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kota Tanjungpinang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1033–1042. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/6951>
- Hasanah, S., Ariyanto, A., Manajemen, M., Pascasarjana, S., & Kuning, U. L. (2025). Pengaruh Program Bedah Rumah Terhadap Kelayakan Hidup Masyarakat Miskin Oleh Peran Pendamping Pu Perkim. *Baseline : Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen*, 2(2), 331–353.
- Lazuardi, D., Gustina, I., Wahyuni, P., & Rinaldi, M. (2025). Peningkatan Akses Layanan Dasar Untuk Mengurangi Kemiskinan: Pendekatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan. *Lebah*, 18(2), 69–76.
- Marinho, E., Campelo, G., França, J., & Araujo, J. (2017). Impact of infrastructure expenses in strategic sectors for Brazilian poverty. *Economia*, 18(2), 244–259. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2017.01.002>
- Nasution, Z. (2014). PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN. *Jurnal Ecobisma*, 1(2), 1–10.
- Oktaviana, V. R., Lestari, A., Prayudha, G. A., & Malik, A. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (The Impact Of Regional Infrastructure Development On Regional Economic Growth). *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9882–9892. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Rediansyah, G., Khoirudin, R., & Yuniarti, D. (2023). Pengaruh Infrastruktur, Air dan Listrik

- Terhadap Perekonomian Daerah di Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jees.v1i1.57>
- Ritohardoyo, S., & Sadali, M. I. (2017). Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Terhadap Tata Ruang Wilayah Di Kota Yogyakarta. *Tataloka*, 19(4), 291. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.4.291-305>
- Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2022). Analisis kemiskinan pada rumah tangga di Jawa Timur melalui pendekatan multidimensi dan moneter. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 127. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.480>
- Saputra, J. (2022). Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(2), 241–249. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1524>
- Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan Di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 13(1), 397–416. <https://doi.org/10.37304/jispar.v13i1.10520>
- Sinamo, N., Nababan, J. P., Sihombing, R., & Lase, R. H. (2025). *Mikro 1-8 Rizky Abdillah* (1) (2). 4(2), 3306–3320.
- Tinambunan, E. victara, Muhammad Findi, & Yeti Lis Purnamadewi. (2020). Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 20–42. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.20-42>
- Utami, M. S., & Ubaidillah, A. (2022). Pendugaan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, Sanitasi Layak, serta Rumah Layak Huni dan Terjangkau pada Level Kecamatan Di Provinsi Papua Tahun 2019 Menggunakan Model Fay Herriot Multivariat. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 437–448. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1498>
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 5(2), 11–22.
- Wijayanto, A. T. (2021). Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3), 668–680. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35883>